

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TINGKAT PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH PADA *WEBSITE*  
DAERAH**

**(Studi Kasus Pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah  
Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2014-2015)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada  
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**TAUFIKA NURANI FAJRI  
12030112140322**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2016**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Penyusun : Taufika Nurani Fajri  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112140322  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGKAT PUBLIKASI  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PADA *WEBSITE* DAERAH**  
(Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Jawa  
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  
2014-2015)  
Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu P., S.E., M.Si., Akt., Ph.D

Semarang, 28 September 2016

Dosen Pembimbing,

Tri Jatmiko Wahyu P., S.E., M.Si., Akt., Ph.D

NIP. 19741026 200003 1001

## **HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Taufika Nurani Fajri  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112140322  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGKAT PUBLIKASI  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PADA *WEBSITE* DAERAH**  
(Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Jawa  
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  
2014-2015)

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Oktober 2016**

Tim Penguji

1. Tri Jatmiko Wahyu P., S.E., M.Si., Akt., Ph.D (.....)
2. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D (.....)
3. Dr. Warsito Kawedar, SE., M.Si., Akt. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Taufika Nurani Fajri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA WEBSITE DAERAH** (Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2015) dalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 September 2016

Yang membuat pernyataan,

Taufika Nurani Fajri

NIM. 12030112140322

## **ABSTRACT**

*This objective of this research is to examine the influence of audit opinion, citizen, wealth, local expenditure, size and press visibility toward publication rate of financial reporting in local government website.*

*The population in this study consist of all city in Central Java province and Daerah Istimewa Yogyakarta province in the year 2014-2015. A total sample of 76 companies were used in this study as determined by total sampling method. The data used is secondary data. Data analysis was performed with descriptive statistics, classical assumption and hypothesis testing of regression method using SPSS 23.*

*The empirical results of this study show that audit opinion, wealth, local expenditure, size and press visibility does not have statistically significant influence toward publication rate of financial reporting in local government website and citizen has significantly positive influence toward publication rate of financial reporting in local government website.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan opini audit, jumlah penduduk, kekayaan daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah dan *press visibility* terhadap tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah pada *website* daerah.

Populasi perusahaan dalam penelitian ini terdiri dari kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 dan 2015. Total sebanyak 76 data pengamatan digunakan dalam penelitian ini dengan pemilihan sampel menggunakan metode *total sampling*. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode regresi menggunakan SPSS 23.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit, kekayaan daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah dan *press visibility* secara statistik tidak memiliki pengaruh tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah pada *website* daerah secara signifikan. Namun jumlah penduduk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah pada *website* daerah.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Dan (ingatlah) juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabKu sangat pedih"*

QS. Ibrahim 14:7

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

*Bapak dan Ibu tercinta*

*Ketiga adik yang selalu ceria*

*Sahabat-sahabat seperjuangan*

*Serta seluruh teman-teman keluarga besar Akuntansi Undip 2012*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul, **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA WEBSITE DAERAH (Studi Kasus Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2015)**

Skripsi ini adalah bentuk tanggungjawab penulis sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunannya skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak. Sehingga tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;
2. Fuad, S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;
3. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt., PhD selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Etna Nur Afry Yuyetta, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali atas arahan dan kesabarannya telah membimbing penulis sebagai Mahasiswa Akuntansi 2012;
5. Hery Subowo S.E., MPM., Ak. selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Pak Asep selaku kepala Humas dan Drs. Parna, MM. selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Pri dan Mas Wahyu selaku Humas, terima kasih atas izin penelitian dan bantuannya;
6. Keluarga tercinta, Bapak Nur Hidayat, Ibu Tutik Wuri, dan ketiga adikku Dianisari Sofia, Burhanif Juang dan Kamila Rizky atas kasih sayang, dukungan baik moral dan material, dan pancaran kebahagiaan yang selalu menguatkan;
7. Para sahabat sholehah Aziza Agung, Rachmatika Adin, Danik Setiya, Rivotriilia dan juga Clara Palupi, dengan keceriaan selama empat tahun bersama, serta berbagai cerita pendewasaan hidup;
8. Pengembang topik penelitian, Fathulhuda, Setiawan, dan Maesa, *Suwun ya, Ndes* untuk senyuman , untuk *sharing* skripsi, dan untuk mimpi-mimpinya;
9. Rekan-rekan EECC 2013-2014, Kesma BEM FEB 2014 dan seluruh fungsionaris BEM FEB 2015 sebagai wadah pemebejarabn organisasi penulis selama berada di Universitas Diponegoro;
10. KKN Tim I Undip 2016, Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Magelang, dan seluruh Keluarga besar Akuntansi 2012, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang;

11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan, terimakasih untuk semangat, doa, dan dukungannya dalam proses hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis selanjutnya.

Semarang, 28 September 2016

Penulis

Taufika Nurani F

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II Telaah Pustaka .....	12
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Teori <i>Stakeholder</i> .....	12
2.1.2 Pemerintah Daerah .....	17
2.1.3 Publikasi melalui Pelaporan Keuangan .....	19
2.1.4 Internet dan <i>Website</i> .....	23
2.1.5 Opini Audit .....	25
2.1.6 Jumlah Penduduk .....	27
2.1.7 Kekayaan Daerah .....	28
2.1.8 Belanja Daerah .....	29
2.1.9 Ukuran Pemerintah Daerah .....	30
2.1.10 Press Visibility .....	31
2.2 Penelitian Terdahulu .....	33
2.3 Kerangka Pemikiran .....	37
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	42
2.4.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Publikasi .....	42
2.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Publikasi .....	43
2.4.3 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Publikasi .....	44
2.4.4 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat Publikasi .....	45
2.4.5 Pengaruh Ukuran Pemda terhadap Tingkat Publikasi .....	47
2.4.6 Pengaruh Press Visibility terhadap Tingkat Publikasi .....	48
BAB III METODE PENELITIAN .....	51
3.1 Variable Penelitian dan Definisi Operasional .....	51
3.1.1 Variabel Penelitian .....	51
3.1.1.1 Variabel Terikat .....	51

3.1.1.2 Variabel Bebas .....	52
3.2.1 Definisi Operasional	
3.2.1.1 Tingkat Publikasi di <i>website</i> .....	52
3.2.1.2 Opini Audit .....	53
3.2.1.3 Jumlah Penduduk .....	53
3.2.1.4 Kekayaan Daerah .....	54
3.2.1.5 Belanja Daerah .....	54
3.2.1.6 Ukuran Pemerintah Daerah.....	55
3.2.1.7 <i>Press Visibility</i> .....	55
3.2 Populasi dan Sample .....	56
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	56
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	57
3.5 Metode Analisis Data.....	58
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	58
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	58
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	58
3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas .....	58
3.5.2.3 Uji Multikolinearitas .....	59
3.5.2.4 Uji Autokorelasi .....	60
3.5.3 Uji Hipotesis.....	60
3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi .....	61
3.5.3.2 Uji Statistik F .....	62
3.5.3.3 Uji Statistik T .....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>64</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	64
4.1.1 Analisis Uji Asumsi Klasik .....	74
4.1.1.1 Uji Normalitas .....	74
4.1.1.2 Multikolinearitas .....	78
4.1.1.3 Uji Heteroskedastisitas .....	79
4.1.1.4 Uji Uji Autokorelasi .....	81
4.1.2 Uji Hipotesis.....	82
4.2.2.1 Uji Koefisien Determinasi .....	82
4.2.2.2 Uji Statistik F .....	83
4.2.2.3 Uji Statistik T .....	83
4.2 Intepretasi Hasil .....	85
4.3 Pembahasan.....	88
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>93</b>
5.1 Simpulan.....	93
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	94
5.3 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1	Indeks Pengukuran Variabel .....	52
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.2	Jumlah Pemda Berdasarkan Publikasi LKPD, Laporan Pendukung dan Keteraksesan Website Daerah .....	69
Tabel 4.3	Transform Variabel .....	75
Tabel 4.6-7	Identifikasi <i>Outlier</i> .....	75
Tabel 4.8	Identifikasi <i>Outlier</i> .....	76
Tabel 4.9	Uji Normalitas .....	77
Tabel 4.10	Uji Multikolinearitas.....	78
Tabel 4.11	Uji Heterokedastisitas.....	80
Tabel 4.12	Uji Autokorelasi .....	81
Tabel 4.13	Koefisien Determinasi .....	77
Tabel 4.14	Uji Statistik F .....	83
Tabel 4.15	Uji Statistik T .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	41
Gambar 4.1 Diagram Berdasarkan LKPD yang Ditampilkan.....	71
Gambar 4.2 Diagram Berdasarkan Laporan Pendukung yang Ditampilkan.....	72
Gambar 4.3 Diagram Berdasarkan Keterkasesan Pada <i>Website</i> Daerah .....	72
Gambar 4.4 Scatterplot .....	79
Gambar 4.5 Grafik Normal p-plot .....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

A. Hasil Output SPSS .....	99
B. Indikator Publikasi dan hasil.....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan penggunaan internet sebagai media yang efisien dan efektif meningkatkan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi. Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet dan Informasi (2014) menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 berjumlah 71,18 juta; diperkirakan meningkat pada tahun 2015 menjadi 81,9 juta dan diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan perbaikan infrastruktur. Perkembangan tersebut kemudian berdampak pada kebutuhan informasi mengenai kinerja pemerintah di masing-masing daerah. Namun tidak semua informasi tersebut dapat diakses masyarakat. Penggunaan internet sebagai media pertanggungjawaban pemerintah belum memiliki aturan baku sehingga menyebabkan pengungkapan laporan belum bisa berjalan efektif (Sinaga, 2011).

Peningkatan pengguna internet di Indonesia dapat dipandang sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi melalui publikasi. Transparansi secara sederhana dijelaskan sebagai keteraksesan dan keterbukaan informasi oleh seluruh masyarakat. Sedangkan publikasi merupakan proses penerbitan salinan informasi (Poerwadarminta, 2007). Bentuk konkret mewujudkan transparansi tersebut pemerintah wajib mempublikasikan laporan pertanggungjawaban. Dalam konteks transparansi, publikasi menyajikan jenis laporan keuangan yang dapat diakses publik melalui media internet.

Menurut Kiskegaar (2009) dalam Bertot (2010) mengatakan “transparansi akhirnya berfungsi untuk menjaga pemerintah pemerintah baik dan jujur” Pemerintah daerah yang menjunjung transparansi dapat dimulai dengan ketersediaan laporan yang dipublikasikan. Laporan Keuangan yang tersedia meningkatkan peranan pihak eksternal. Langkah pemerintah dengan membuka akses melalui publikasi menjadi bentuk dukungan dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan berbagai pihak pada akhirnya akan memacu pimpinan daerah untuk menjamin pengelolaan sudah dilakukan sesuai, guna mencapai kesejahteraan rakyat dilihat dari terpenuhinya akses informasi.

Laporan keuangan merupakan salah satu media untuk meningkatkan transparansi, dalam upaya mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab diperlukan laporan keuangan yang memuat beberapa komponen diantaranya adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arus Kas. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menjelaskan tambahan komponen pertanggungjawaban yakni Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan beberapa laporan tambahan. Keseluruhan komponen tersebut menjadi ukuran keterbukaan yang dilakukan.

Publikasi merupakan bentuk pertanggungjawaban di media (Trisnawati, 2014). Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban dalam proses perencanaan, penyusunan. Pemerintah sebagai suatu entitas pelapor berkewajiban untuk membuat dan mengungkapkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban didasarkan pada peran pemerintah antara lain; (a) menguasai

sumber-sumber vital kekayaan negara; (b) menggunakan sumber-sumber tersebut berdampak besar dan menguasai hajat hidup masyarakat luas; dan (c) pemisah antara sumber-sumber kekayaan manajemen dan pemilik (Partono 2000). Kewajiban tersebut akan memperkecil korupsi dan tindakan lain yang tidak bertanggungjawab. Dengan kata lain laporan keuangan digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan daerahnya.

Ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai penyampaian, pertanggungjawaban dan pelaksanaan anggaran. Ketentuan lain terdapat pada Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, ; Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Namun, keseluruhan peraturan tersebut tidak menjelaskan media yang digunakan dalam publikasi secara spesifik, sehingga pemerintah daerah merasa tidak berkewajiban dalam menerapkannya.

Karena tidak diwajibkan dalam publikasi laporan keuangan tersebut, berimbas pada pemanfaatan *website* yang rendah dalam mempublikasikan pertanggungjawaban. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pemerintah daerah hanya wajib melakukan pertanggungjawaban kepada DPRD. Sehingga pertanggungjawaban melalui publikasi kepada masyarakat dan terkesan diabaikan. Pengawasan maksimal hanya dilakukan oleh DPRD namun tidak melibatkan

masyarakat sebagai *stakeholder* terbesar. Bentuk konkret mewujudkan transparansi tersebut pemerintah wajib mempublikasikan laporan pertanggungjawaban. Pemanfaatan internet yang tidak maksimal berdampak bagi transparansi karena internet memiliki manfaat yang akan berpengaruh positif pada upaya pengawasan eksternal.

Sifat internet yang mudah diakses, efektif dalam menjangkau masyarakat luas, dan efisien dalam biaya operasional menjadikan *internet* sebagai solusi pemerintah dalam meningkatkan transparansi melalui publikasi laporan keuangan. Menurut Bertot, dkk (2010) penggunaan teknologi melalui internet akan menciptakan budaya transparansi, efisien dalam penyampaian (Woldenberg, 2004) dan meningkatkan pengendalian dari tindakan korupsi (Shim dan Eom, 2008) Penggunaan internet dapat meminimalkan biaya karena bersifat *paperless*. Bagaimanapun penggunaan *internet* belum didukung dengan peraturan terkait. daerah tidak memaksimalkan penggunaan internet sebagai upaya transparansi.

Hanya sebagian pemerintah baru memanfaatkan internet sebagai media komunikasi efektif. Saat ini faktor heterogenitas pemerintah daerah mempengaruhi dalam bidang tingkat publikasi dimana informasi mengenai laporan keuangan dipublikasikan, dari jumlah laporan dan format yang berbeda menyebabkan masing-masing memiliki tingkat variasi yang berbeda. Variasi ini memicu ketidaklengkapan informasi yang ada. Sehingga muncul pertanyaan apakah publikasi yang dilakukan sudah mencukupi dan sesuai? Apa saja yang mendorong pemerintah daerah untuk mau melaksanakan publikasi di internet? Sehingga perlu

dilakukan penelitian yang mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pemerintah dalam mempublikasikan informasi laporan keuangannya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Laswad, dkk di Selandia Baru tahun 2015, menyimpulkan bahwa tentang yang digunakan dalam pengukuran berpengaruh signifikan yakni kekayaan daerah, *pers visibility* dan kekayaan daerah memiliki pengaruh positif. Sedangkan tipe pemerintahan tidak mempengaruhi jalannya pelaporan sukarela pada pemerintah daerah. Penelitian Sinaga (2011) menjelaskan bahwa variabel komitmen politik, ukuran pemerintah, *leverage*, kekayaan daerah dan tipe pemerintahan tidak berpengaruh signifikan dalam pengungkapan pelaporan keuangan secara signifikan di internet.

Cinca dkk, (2009) juga telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor tersebut di Spanyol. Ukuran daerah, besar utang daerah, visibilitas internet, pendapatan perkapita, tingkat pendidikan penduduk dan komitmen sosial politik terhadap tingkat pengungkapan pada internet melalui *website* daerah. Pengujian yang dilakukan membuktikan bahwa ukuran daerah, tingkat pendapatan perkapita memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan yang dilakukan. Dari ketidakkonsistenan penelitian tersebut peneliti merasa perlu untuk mengkaji kembali seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang dalam mempengaruhi tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah pada *website* daerah.

Penelitian ini menguji sejauh mana tingkat publikasi melalui pengungkapan informasi di *internet* oleh pemerintah daerah. Topik penelitian pengungkapan sukarela sebelumnya lebih *familiar* dengan sektor swasta. Sehingga diharapkan

melalui penelitian ini dapat meningkatkan referensi dalam pengungkapan pelaporan keuangan secara sukarela di internet.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur dan pembahasan pada sektor publik masih hangat setelah penetapan dimana di era kemajuan teknologi komunikasi menuntut pemerintah lebih transparan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu opini audit, jumlah penduduk, *press visibility*, kekayaan daerah, belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan latar penelitian di Indonesia di Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menggunakan judul penelitian **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Publikasi Laporan Pemerintah Daerah Pada Website Daerah. Studi Kasus Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah dan DIY Tahun 2014-2015.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Variabel dalam penelitian ini adalah opini audit, jumlah penduduk, kekayaan daerah, belanja daerah ukuran pemerintah daerah dan *press visibility*. Berikut ini adalah uraian hubungan masing-masing variabel.

Pertama, Pemerintah dengan opini audit yang baik berusaha menunjukkan kepada masyarakat akan pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan amanah rakyat. Opini audit yang merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemda juga diduga berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet (Trisnawati, 2011). Penelitian Andriani (2012)

menjelaskan bahwa ada hubungan positif antara opini audit dan tingkat pengungkapan, hal tersebut disimpulkan bahwa jika temuan audit BPK akan berdampak pada kepercayaan pemerintah dalam melakukan pengungkapan secara luas untuk menghindari persepsi publik negatif.

Kedua, jumlah penduduk mendorong kebutuhan akan informasi menjadi lebih besar. Penelitian oleh Hilmi (2010) menjelaskan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat publikasi laporan keuangan. Kelompok usia produktif cenderung lebih peka terhadap sesuatu yang berhubungan dengan *trend* teknologi dan pemanfaatan, hal tersebut didukung dengan sikap dan kepercayaan pemakai teknologi dalam memprediksi pemanfaatan informasi sehingga tingkat efektifitas keberhasilan akan lebih besar (Thompson et al, 1991). Namun, Andriani (2009) menjelaskan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan

Kekayaan daerah mempengaruhi tingkat publikasi karena semakin besar akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki manajemen yang baik dalam memaksimalkan potensi daerah yang ada. Kepala daerah akan cenderung mempublikasikan karena dianggap sebuah prestasi.

Belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat publikasi laporan keuangan di internet. Klaim tersebut dijelaskan karena belanja daerah akan menunjukkan seberapa besar penggunaan dan penyerapan dana yang telah dianggarkan melalui APBD. Hal tersebut merupakan suatu bentuk realisasi. Menurut Marfiana (2011) pemerintah dengan belanja yang tinggi maka akan cenderung ingin memberikan

sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintah telah melaksanakan amanah rakyat dengan baik.

Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat publikasi laporan keuangan secara sukarela di internet dengan positif. Dapat dijelaskan bahwa semakin besar ukuran kekayaan daerah maka mencerminkan bahwa daerah tersebut memiliki daya kelola yang lebih rumit. Menurut Ashbaugh (1999) organisasi memiliki masing-masing strategi untuk mengungkapkan, dalam penelitian yang dilakukan di Singapura menjelaskan ketika sebuah perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan lebih cenderung mengungkapkannya di internet, bahkan cenderung lebih banyak dari pada yang relatif lebih kecil ukurannya. Marwata (2000) dalam Murni (2004) mengemukakan bahwa perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil.

Pemerintah dengan sorotan press yang tinggi maka ia cenderung menangkalnya dengan publikasi. (Laswad, 2005). Topik media memberitakan berkenaan dengan korupsi, skandal keuangan dan deficit anggaran terlihat lebih menjual dalam rangka menarik atensi publik (Afryansyah, 2013). Pemerintah akan membuktikan bahwa pemerintah berlaku baik dalam pengelolaan keuangan Hal ini memotivasi pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporannya di berbagai media. Penelitian yang dilakukan Cinca, dkk (2009) menjelaskan bahwa pemerintah dengan publikasi yang tinggi diakibatkan adanya pengaruh media

dalam pemberitaan. Sehingga peran internet dianggap efektif dan efisien untuk memberikan gambaran positif pemerintahan yang sedang berjalan.

Berdasarkan uraian variabel tersebut diatas, maka dirumuskan masalah penelitian apakah opini audit, jumlah penduduk, kekayaan daerah, belanja daerah ukuran pemerintah daerah dan *press visisbility* mempengaruhi tingkat publikasi laporan pemerintah daerah pada *website* daerah terhadap kota/kab di Jawa Tengah dan DIY pada tahun 2014-2015?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji dan menganalisis bahwa opini audit, jumlah penduduk, kekayaan daerah, belanja daerah ukuran pemerintah daerah dan, *press visisbility* mempengaruhi tingkat publikasi laporan pemerintah daerah pada *website* daerah. studi kasus terhadap kota/kab di Jawa Tengah dan DIY pada tahun 2014-2015.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah dalam melakukan publikasi laporan keuangannya pada internet melalui *website* daerahnya.

2. Dengan dilakukan publikasi maka bermanfaat dalam rangka akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat berperan aktif untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan daerah.
3. Bagi penelitian selanjutnya sebagai literatur dalam pengembangan penelitian mengenai sektor publik dan transparansi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi

##### **BAB II Telaah Pustaka**

Bab II menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan berkenaan dengan pengaruh variabel-variabel yang digunakan yakni opini audit, jumlah penduduk, kekayaan daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah dan *press visibility* terhadap tingkat publikasi di website pemerintah daerah. Penelitian yang sudah dilakukan, kerangka dan hipotesis yang akan digunakan.

##### **BAB III Metode Penelitian**

Berisi tentang variable penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh opini audit, jumlah penduduk, kekayaan daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah dan press visibility terhadap tingkat pengungkapan.

#### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasannya secara sistematis terhadap hasil penelitian yang dilakukan serta hasil banding dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **BAB IV Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Bahasan mengenai pejelasan atas keterbatasan dan saran-saran yang ditujukan bagi pemerintah daerah sebagai bahas kajian mengenai publikasi dan transparansi juga sebagai *literature* pada penelitian selanjutnya.